

BAB I

PENDAHULUAN

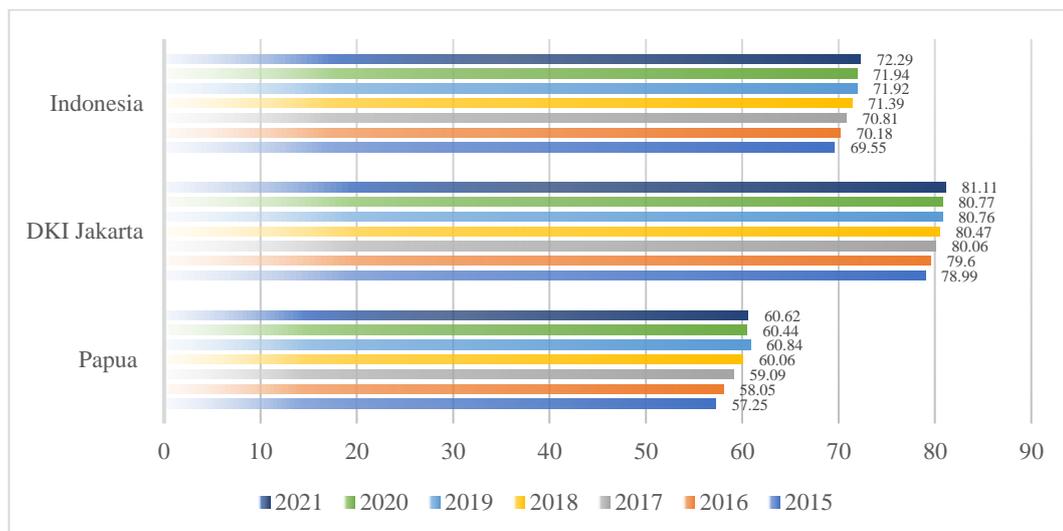
1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan suatu negara. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Rosni, 2017).

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang pada saat ini dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup mengukur kesehatan, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir daya beli mengukur standar hidup. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia di suatu daerah menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah tersebut meningkat (BPS, 2021).

Menurut Amartya Sen, seorang pengembang indeks pembangunan manusia pada tahun 1998, “kesejahteraan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat dengan memiliki pendapatan, mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang baik”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan menempati urutan kelima di antara negara-negara ASEAN pada tahun 2021. Namun pada tiap provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan yang signifikan. Berikut gambar yang menunjukkan besarnya capaian IPM di Indonesia (BPS, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2022

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

Berdasarkan data dari Gambar 1.1 dapat dilihat terdapat perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada periode 2016-2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun secara nominal tetap tumbuh secara positif. Pada periode 2015-2019, IPM Nasional tumbuh berturut-turut sebesar 0.93%, 0.91%, 0.90%, 0.82%, dan 0.74%. IPM Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 0.49%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 0.03%. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 itu terjadi dikarenakan Pandemi COVID-19 yang melanda. IPM tertinggi di tingkat provinsi tahun 2021 dicapai oleh DKI Jakarta (81.11%) dan yang terendah Papua

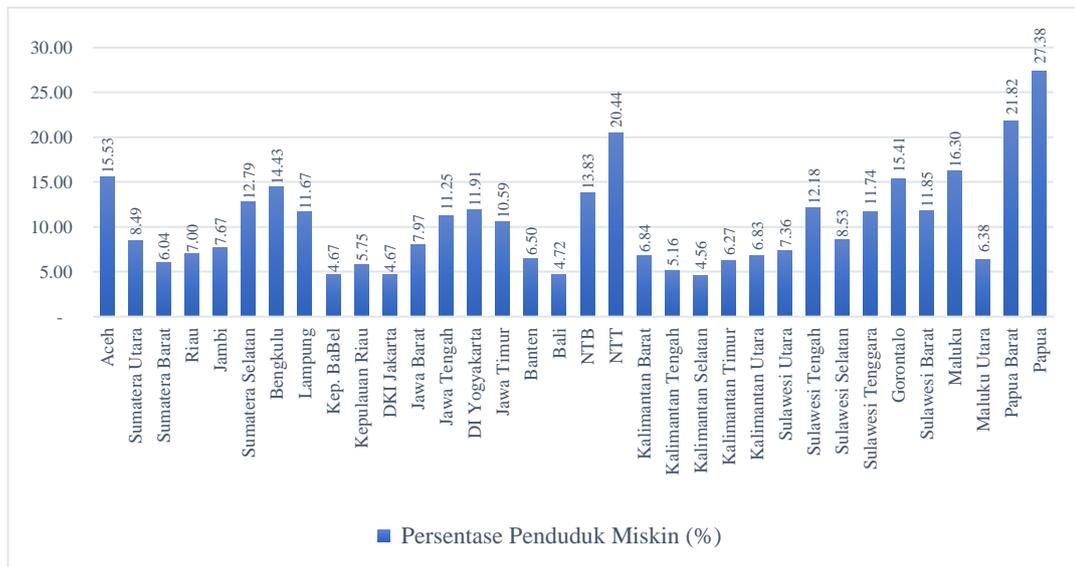
(60.62%). Meskipun IPM Indonesia secara keseluruhan meningkat, namun yang menjadi masalah adalah perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persentase IPM Indonesia yang masih belum merata. Ini juga menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai karena kebutuhannya terpenuhi. seperti kebutuhan primer yaitu pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lain yang mendukung masyarakat itu dapat dikatakan sejahtera. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kepuasan adalah keterbebasan dari kemiskinan (Rasbin, 2016). Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Kemiskinan merupakan kondisi atau keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Mulia (2022) juga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penduduk miskin menggunakan pendapatannya hanya untuk kebutuhan makanan. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak.

Jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 270,20 juta jiwa dengan persentase penduduk miskinnya sebesar 9.71%.

Berikut gambar yang menunjukkan persentase penduduk miskin di 34 provinsi Indonesia BPS (2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2022

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2021

Jika melihat persentase penduduk miskin dari 34 provinsi Indonesia, maka dapat diketahui adanya 16 Provinsi yang berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2021 (9.71%). Adapun 16 Provinsi tersebut jika diurutkan dari persentase kemiskinan paling tinggi adalah Papua (27.38%), Papua Barat (21.82%), NTT (20.44%), Maluku (16.30%), Aceh (15.53%), Gorontalo (15.41%), Bengkulu (14.43%), NTB (13.83%), Sumatera Selatan (12.79%), Sulawesi Tengah (12.18%), DI Yogyakarta (11.91%), Sulawesi Barat (11.85%), Sulawesi Tenggara (11.74%), Lampung (11.67%), Jawa Tengah (11.25%), dan Jawa Timur (10.59%). Persentase penduduk miskin juga memberikan gambaran terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan teknologi masih sederhana, sumber daya manusia masih kurang tenaga ahli (*human capital*). Pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan ketimpangan pendapatan.

16 provinsi termiskin didominasi wilayah timur, provinsi Papua menempati peringkat pertama sebagai provinsi termiskin dengan jumlah penduduk miskin pada September 2021 mencapai 944.49 ribu orang. Jumlah penduduk miskin meningkat 24.05 ribu orang dibandingkan Maret 2021.

Namun, masalah kemiskinan bukan hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin semata. Ada dimensi lain yang harus diperhatikan salah satunya adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Papua (5.60), Papua Barat (5.49), NTT (3.96), serta Gorontalo (2.87) merupakan provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan terbesar. Dengan demikian kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya paling lebar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Masih lebarnya indeks kedalaman kemiskinan ini

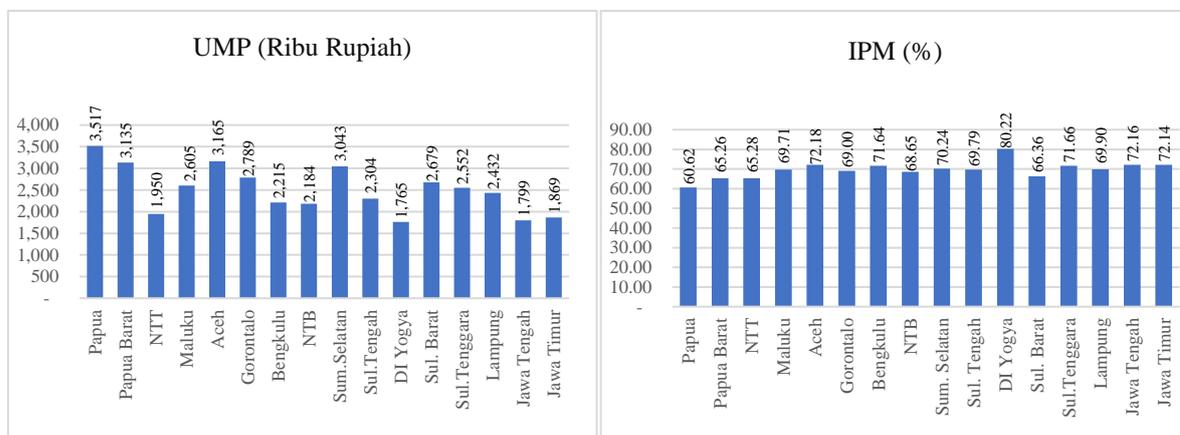
membuat anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah ini juga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kemiskinan mengakibatkan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya berawal dari ketidakmampuan daya beli masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan bisa terabaikan (Adelfina et al., 2016).

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa (BPS, 2022). Daya beli berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan bekerja. Masyarakat dengan pendapatan yang relatif kecil akan mengkonsumsi barang/jasa dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang lebih sedikit. Menurut Silvia et al. (2021) pendapatan masyarakat berhubungan erat dengan upah minimum. Ketika upah minimum meningkat, maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan & Ikhsan (2018) juga menyatakan “Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya UMP”, kemiskinan akan semakin menurun. Keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan adalah, ketika kemiskinan menurun maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, namun sebaliknya jika kemiskinan meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Berger et al. (2022) juga menyatakan “upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan”. Upah minimum

provinsi dan indeks pembangunan manusia pada 16 Provinsi termiskin di Indonesia tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.3.



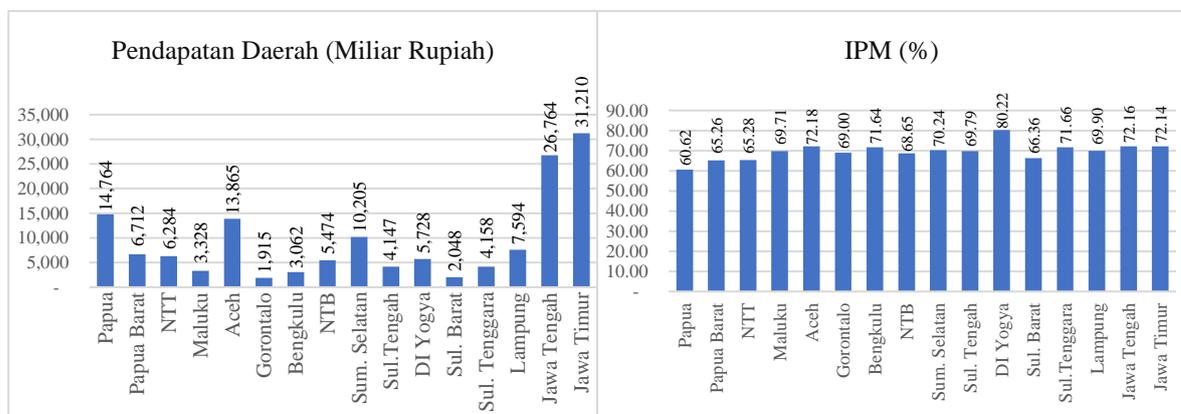
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2022

Gambar 1.3 Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Provinsi Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan data IPM pada Gambar 1.3 di atas, DI Yogyakarta (80.22%) merupakan provinsi termiskin dengan IPM yang tertinggi, namun UMP masih tergolong sangat rendah. Di lain sisi, provinsi dengan capaian IPM yang terendah, yaitu Papua, memiliki nilai UMP yang sangat tinggi. Perbedaan ini terjadi karena adanya variasi tingkat kehidupan dan biaya hidup di setiap daerah. Yogyakarta bukan sebuah kota industri, walaupun berada di Pulau Jawa. Beberapa kebutuhan pokok juga terbilang murah. Kultur Yogyakarta yang romantis dan masyarakat yang harmonis menjadi salah satu aspek kesejahteraan subjektif bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Sementara itu, kondisi geografis dan topografis dan dukungan infrastruktur yang masih minim di Papua menyebabkan biaya hidup di sana sangat mahal.

Pendapatan daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Juliarini (2019) menyatakan bahwa terdapat

korelasi positif dan sangat kuat antara pendapatan daerah dengan IPM. Artinya, ketika pendapatan daerah meningkat maka IPM juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita (2020) bahwa Pendapatan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendapatan daerah di 16 Provinsi Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2022

Gambar 1.4 Pendapatan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Provinsi Indonesia Tahun 2021

Data pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi tidak selalu diikuti dengan IPM yang tinggi pula. Pada tahun 2021, Papua merupakan provinsi dengan pendapatan daerah yang relatif cukup tinggi sebanyak 14.7 triliun rupiah, akan tetapi capaian IPM daerah tersebut sangat rendah, hanya sebesar 60.62%. Di sisi lain, Yogyakarta memiliki pendapatan daerah sebanyak 5.7 triliun, tiga kali lebih rendah dari provinsi Papua. Namun pada kenyataannya mampu mencapai IPM sebesar 80.22%. Angka ini termasuk kategori sangat tinggi untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan daerah. Kenaikan pendapatan daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih belum berjalan seimbang. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain kebijakan pemerintah daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi sumber daya di setiap provinsi berbeda-beda, serta kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Berdasarkan teori dan riset yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dapat dikatakan bahwa variabel kemiskinan, upah minimum provinsi, dan pendapatan daerah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi dan fakta yang berkembang, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah tingkat kemiskinan, upah minimum provinsi (UMP), dan pendapatan daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Provinsi Indonesia melalui judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia**”. Penulis juga menyadari masih sedikit penelitian sebelumnya terkait hal ini, apalagi dengan lokasi penelitian yang akan penulis analisis.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

2. Apakah upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?
3. Apakah pendapatan daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa hal terkait yang ada pada bagian sebelumnya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh pendapatan daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, upah minimum provinsi (UMP), dan pendapatan daerah terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai referensi dan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.